

KOMUNIKASI DAKWAH FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) MELALUI HABIB RIZIEQ SHIHAB PADA SIKAP POLITIK PEMERINTAH

Linda Tunaerah

Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pasundan

E-mail: lindaunpas@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the representation of Habib Rizieq Shihab's dakwah communication in national media coverage regarding the Indonesian government's political attitudes. Although studies on FPI and Habib Rizieq have been extensively conducted, research on the representation of his dakwah communication through semiotic analysis in media coverage remains limited. This study aims to uncover the denotative, connotative, and mythical meanings constructed in media coverage of Habib Rizieq's dakwah communication and how these representations shape public perceptions of the relationship between FPI and the government. The research employs a qualitative approach using Roland Barthes' semiotic analysis method. The main data sources are three news videos from KompasTV and CNN Indonesia published during November–December 2020, selected purposively as they represent crucial moments of Habib Rizieq's return and conflict with the government. Analysis was conducted through stages of sign identification, denotative meaning, connotative meaning, and myth. The findings reveal that media coverage constructs three main myths: (1) the government as a firm authority and protector of public interest, (2) Habib Rizieq as a controversial figure threatening stability, and (3) the conflict between the government and FPI as a battle between legal compliance versus ideological resistance. The scientific contribution of this study is expanding the application of Barthes' semiotics in analyzing dakwah communication in media, as well as offering a critical understanding of how media shapes narratives of religious-political conflict in Indonesia.

Keywords: *Dakwah Communication, Habib Rizieq Shihab, Islamic Defenders Front (FPI), Roland Barthes' Semiotics, Media Representation.*

I. PENDAHULUAN

Front Pembela Islam (FPI) telah menjadi salah satu aktor sosial-politik yang paling kontroversial di Indonesia sejak didirikan pada tahun 1998. Melalui aksi-aksi dan retorika yang provokatif, FPI dan pemimpinnya, Habib Rizieq Shihab, telah berhasil menarik perhatian publik dan media (Jahroni, 2018). Habib Rizieq Shihab, dengan gaya komunikasinya yang khas, sering

menggunakan dakwah sebagai platform untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah serta menyuarakan kepentingan umat Islam di Indonesia (Woodward et al., 2014).

Salah satu pendekatan yang relevan untuk memahami cara Habib Rizieq membentuk dan menyampaikan pesannya adalah melalui teori semiotika Roland

Barthes. Barthes, dalam teorinya tentang mitos, menjelaskan bagaimana tanda-tanda (*signs*) dapat digunakan untuk membentuk makna yang lebih dalam dan ideologis (Barthes, 2007). Mitologi, menurut Barthes, adalah cara di mana makna-makna ideologis disisipkan dalam budaya sehari-hari dan diterima sebagai kebenaran yang alami (Allen, 2003). Dengan menganalisis Komunikasi Dakwah Habib Rizieq menggunakan semiotika Barthes, kita dapat mengungkap mitos-mitos yang dibangun dan disebarkan melalui tanda-tanda verbal dan non-verbal dalam komunikasi politik.

Komunikasi Dakwah yang disampaikan Habib Rizieq seringkali mencampuradukkan unsur-unsur agama dan politik dalam satu kemasan. Dalam konteks ini, terjadi proses apa yang disebut Barthes sebagai "naturalisasi" makna, di mana ideologi tertentu disamarkan dan disampaikan seolah-olah sebagai sesuatu yang alami dan tak terbantahkan (Culler, 1983). Dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan dan narasi keislaman, Habib Rizieq mampu menyampaikan pesan-pesan politik yang tersembunyi di balik Komunikasi Dakwahnya.

Analisis semiotika dapat mengungkap bagaimana Komunikasi

Dakwah Habib Rizieq membangun dan menyebarkan mitos-mitos tertentu, seperti mitos tentang pemerintah yang anti-Islam, mitos tentang perlunya menegakkan syariat Islam, atau mitos tentang umat Islam sebagai korban dari ketidakadilan. Mitos-mitos ini kemudian diterima sebagai kebenaran oleh sebagian masyarakat, terutama pendukung FPI, dan menjadi landasan bagi aksi-aksi politik mereka (Yuningrum, 2018).

Selain itu, semiotika Barthes juga dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana Komunikasi Dakwah Habib Rizieq memanfaatkan tanda-tanda verbal dan non-verbal, seperti pilihan kata, gaya bahasa, intonasi suara, ekspresi wajah, dan gerak tubuh. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai penanda (*signifier*) yang kemudian dikaitkan dengan petanda (*signified*) tertentu, sehingga menciptakan makna-makna tertentu yang ingin disampaikan kepada audiens (Barthes, 2007). Dengan mengungkap makna-makna tersembunyi di balik Komunikasi Dakwah Habib Rizieq, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana komunikasi politik dilakukan melalui saluran agama dan bagaimana mitos-mitos tertentu disebarkan untuk mempengaruhi opini publik dan mendukung agenda politik tertentu.

Penelitian ini penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana simbol-simbol dan narasi yang digunakan oleh tokoh-tokoh agama dapat mempengaruhi dinamika politik di Indonesia. Dalam konteks FPI dan Habib Rizieq Shihab, penggunaan mitos bukan hanya tentang menyampaikan pesan religius, tetapi juga tentang membangun identitas kolektif yang kuat di antara para pengikutnya dan memobilisasi dukungan politik. Melalui analisis semiotika Roland Barthes, kita dapat mengungkap lapisan makna yang tersembunyi di balik Komunikasi Dakwah tersebut dan memahami bagaimana makna-makna ini diterjemahkan menjadi sikap dan tindakan politik (Barthes, 2006; Sobur, 2009).

Penelitian tentang FPI dan Habib Rizieq telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif. Jahroni (2018) mengkaji FPI sebagai gerakan sosial-keagamaan yang memanfaatkan isu-isu moral untuk memobilisasi massa. Woodward dkk menganalisis pola kekerasan religius yang melibatkan FPI dalam konteks politik Indonesia (Woodward et al., 2014). Fathimuzzahra dan Hilmy meneliti populisme religius dalam wacana Habib Rizieq dan FPI (Fathimuzzahra & Hilmy,

2020). Sementara itu, Yuningrum (2018) menggunakan semiotika Roland Barthes untuk menganalisis mitos politik dalam kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Namun, penelitian tentang representasi komunikasi dakwah Habib Rizieq dalam pemberitaan media nasional - khususnya yang menggunakan analisis semiotika Barthes untuk mengungkap mitos-mitos yang dibangun melalui pemberitaan tersebut - masih terbatas. Belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis bagaimana media mengkonstruksi narasi tentang komunikasi dakwah Habib Rizieq dalam konteks konflik dengan pemerintah, serta bagaimana representasi tersebut membentuk mitos-mitos ideologis tertentu. Dengan demikian, *research gap* penelitian ini terletak pada belum terpetakannya secara sistematis representasi komunikasi dakwah Habib Rizieq dalam pemberitaan media menggunakan kerangka semiotika Barthes.

Penelitian ini penting dilakukan karena (1) memberikan pemahaman kritis tentang bagaimana media membentuk narasi konflik agama-politik di Indonesia, (2) mengungkap strategi representasi yang digunakan media dalam memberitakan tokoh agama yang kontroversial, dan (3) mengisi kekosongan studi tentang komunikasi dakwah di media

menggunakan pendekatan semiotika. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pemberitaan media merepresentasikan komunikasi dakwah Habib Rizieq dan bagaimana representasi tersebut membangun mitos-mitos tertentu tentang relasi antara FPI dan pemerintah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis semiotika model Roland Barthes. Barthes mengembangkan teori semiotika yang tidak hanya berhenti pada makna denotasi dan konotasi, tetapi juga mengungkap mitos - tingkat makna ideologis yang diterima sebagai kebenaran alami (Barthes, 2007; Allen, 2003). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap lapisan makna tersembunyi di balik tanda-tanda verbal dan nonverbal dalam pemberitaan media.

Sumber Data: Sumber data utama penelitian ini adalah tiga video pemberitaan dari media nasional yang dipilih secara purposive dengan kriteria: (1) memberitakan peristiwa penting terkait kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia dan konflik dengan pemerintah, (2) dipublikasikan oleh media nasional terpercaya (KompasTV dan CNN Indonesia), dan (3) dipublikasikan

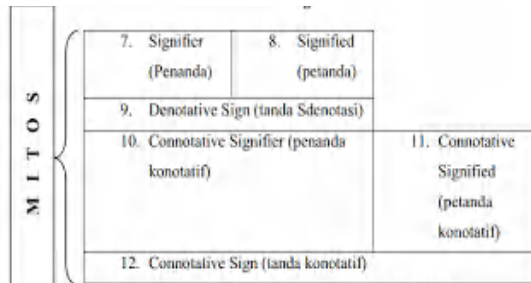
selama periode November - Desember 2020, saat terjadi puncak konflik antara FPI dan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan kerumunan massa.

Pemilihan ketiga video ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiganya merepresentasikan momen krusial dalam konflik antara pemerintah dan FPI, serta menampilkan secara eksplisit komunikasi dakwah Habib Rizieq dan respons pemerintah.

Teknik Pengumpulan Data: Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: (1) observasi, yaitu pengamatan terhadap elemen visual dan auditori dalam video pemberitaan; (2) dokumentasi, yaitu pengambilan gambar dan transkrip dialog dari setiap video; dan (3) studi pustaka, yaitu pengumpulan literatur terkait semiotika Barthes, komunikasi dakwah, dan konteks sosial-politik FPI.

Prosedur Analisis: Analisis dilakukan melalui tahapan: (1) identifikasi tanda-tanda (signifiers) berupa elemen verbal dan nonverbal dalam setiap video; (2) analisis makna denotasi, yaitu makna literal atau nyata dari tanda-tanda tersebut; (3) analisis makna konotasi, yaitu makna kultural dan emosional yang melekat pada tanda; (4) analisis mitos, yaitu tingkat makna ideologis

yang diterima sebagai kebenaran alami; dan
 (5) sintesis temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.



Sumber: *Semiotika Teori dan Aplikasi pada Desain Logo* (2021)

Gambar 1. Teori Semiotika Roland Barthes

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber (membandingkan informasi dari berbagai media) dan triangulasi teknik (memadukan observasi, dokumentasi, dan studi pustaka). Peneliti juga meningkatkan ketekunan dengan melakukan pengamatan berulang terhadap video dan memeriksa konsistensi interpretasi (Sugiono, 2019; Moleong, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini memberikan fokus tentang interaksi dan konflik antara pemerintah Indonesia dan Front Pembela Islam (FPI), dengan fokus utama pada Komunikasi Dakwah yang digunakan oleh Habib Rizieq Shihab. Menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes, pembahasan ini mengungkap lapisan makna yang tersembunyi di balik simbol-simbol dan tanda-tanda yang muncul dalam retorika Habib Rizieq.

Makna Denotasi, Konotasi dan Mitos

Scene 1:



Sumber : (KompasTV, 2020b)

Gambar 2. Mahfud MD: Kami Sesalkan Sikap Habib Rizieq Shihab

Tabel 1.

Analisis Video detik ke 00:00-00:19

Dialog	
detik 00:00-00:14	detik 00:00-00:14 terdapat Narasi berupa tulisan: Mafud MD: Kami Sesalkan Sikap Rizieq Shihab Tolak Tracing Covid-19.



detik 00:14-01:45



Pemerintah Sangat Sesalkan Sikap Pemimpin FPI Rizieq Shihab yang menolak penelusuran kontak oleh Satgas Covid-19.

Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, Rizieq pernah lakukan kontak Erat dengan pasien Covid-19

detik 00:14-01:45

Kami sangat menyesalkan sikap saudara Muhammad Rizieq Shihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak, mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19, kami meminta sekali lagi kepada masyarakat luas siapa pun itu untuk kooperatif hingga penanganan Covid-19 berhasil, pemerintah akan melakukan Langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan, yang membahayakan keselamatan dan Kesehatan masyarakat, terkait itu pemerintah juga menegaskan akan terus dilakukan proses-proses hukum sesuai hukum yang berlaku demi kebaikan bersama.

Dan muncul Kembali tulisan bernarasikan: Pemerintah meminta agar masyarakat kooperatif dalam penanganan virus corona.

Denotasi

Seorang pria dewasa berkacamata yang sedang memberikan pidato didampingi oleh dua pria dewasa lainnya, dengan teks yang menunjukkan identitasnya sebagai Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Mahfud MD menyampaikan informasi bahwa pemerintah menyesalkan sikap Rizieq Shihab, pemimpin FPI, yang menolak tracing Covid-19.

Sementara Mahfud MD berbicara, video lain ditampilkan, memperlihatkan kerumunan orang berpakaian putih yang mengikuti sebuah mobil putih secara ramai, di mana di dalam mobil tersebut terdapat seorang pria dewasa berpakaian putih yang diidentifikasi sebagai Rizieq Shihab. Teks pada video ini menyatakan bahwa pemerintah sangat menyesalkan sikap Rizieq Shihab yang menolak tracing Covid-19 dan bahwa Rizieq pernah melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19.

Video tersebut menampilkan Mahfud MD yang menekankan pentingnya masyarakat untuk kooperatif dalam penanganan Covid-19 dan menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Teks lain yang muncul mengulangi permintaan pemerintah agar masyarakat kooperatif dalam penanganan virus corona. Video kembali menunjukkan kerumunan

Konotasi

1. Kredibilitas dan Otoritas Pemerintah: Penampilan Mahfud MD yang berkacamata, berpakaian formal, dan memberikan pidato resmi didampingi oleh dua pria dewasa lainnya menciptakan konotasi tentang otoritas dan kredibilitas pemerintah. Ini menggambarkan bahwa pemerintah memiliki posisi yang kuat dan kompeten dalam menangani masalah serius, seperti penanganan Covid-19.
2. Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan: Pernyataan Mahfud MD tentang pentingnya masyarakat untuk kooperatif dalam penanganan Covid-19 menekankan konotasi tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Ini menyiratkan bahwa kerjasama masyarakat sangat penting untuk keberhasilan upaya pemerintah dalam mengendalikan pandemi.
3. Ketegasan Pemerintah terhadap Pelanggaran: Pernyataan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat mengandung konotasi tentang ketegasan dan ketidakberpihakan pemerintah dalam menegakkan hukum. Ini menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi kesehatan publik tanpa pandang bulu.
4. Konflik dan Ketegangan Sosial: Video yang menunjukkan kerumunan besar pendukung Rizieq Shihab yang mengikuti mobil putih menggambarkan konotasi tentang adanya konflik dan ketegangan sosial. Kerumunan ini menciptakan gambaran tentang ketidakpatuhan dan resistensi terhadap upaya

orang yang mengikuti mobil putih dengan Rizieq Shihab di dalamnya, menyoroti sikap pemimpin FPI yang menolak penelusuran kontak oleh Satgas Covid-19.

pemerintah dalam penanganan Covid-19, menunjukkan adanya perpecahan dalam masyarakat.

5. Legitimasi dan Dukungan Pemerintah: Kehadiran dua pria dewasa yang mendampingi Mahfud MD, serta narasi teks yang menyertai pidato tersebut, memberikan konotasi tentang legitimasi dan dukungan internal terhadap keputusan dan tindakan pemerintah. Ini mencerminkan bahwa pemerintah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya.

6. Simbolisme Sosial dan Religius: Kerumunan orang berpakaian putih yang mengelilingi mobil putih tempat Rizieq Shihab berada menambahkan konotasi simbolis tentang identitas sosial dan religius dari pendukung Rizieq Shihab. Pakaian putih sering dikaitkan dengan kesucian dan ketaatan religius, memperlihatkan bahwa ada dimensi keagamaan yang kuat dalam dukungan terhadap Rizieq Shihab.

Kesimpulannya, makna konotasi dari gambaran ini mencerminkan dinamika kompleks antara otoritas pemerintah, kepatuhan masyarakat, ketegasan dalam penegakan hukum, konflik sosial, serta simbolisme religius dalam konteks penanganan pandemi Covid-19.

Mitos

Makna Mitos:

1. **Mitos Pemerintah yang Tegas dan Berwibawa:** Gambaran Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang memberikan pernyataan resmi menciptakan mitos tentang pemerintah yang tegas dan berwibawa dalam menghadapi situasi krisis. Ini memperkuat citra bahwa pemerintah memiliki kendali penuh dan bertindak dengan ketegasan demi kepentingan umum, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi Covid-19.
2. **Mitos Kebaikan Umum vs. Kepentingan Pribadi:** Pernyataan bahwa Rizieq Shihab menolak tracing Covid-19 dan bahwa pemerintah menyesalkan tindakannya menciptakan mitos tentang konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Dalam narasi ini, pemerintah digambarkan sebagai pihak yang berupaya melindungi kesehatan masyarakat luas, sementara individu atau kelompok tertentu yang menolak mengikuti aturan kesehatan dianggap membahayakan keselamatan bersama.
3. **Mitos Ketertiban dan Keamanan:** Kehadiran Mahfud MD dan narasi tentang tindakan tegas pemerintah terhadap pelanggaran protokol kesehatan menggarisbawahi mitos bahwa ketertiban dan keamanan adalah nilai-nilai yang harus dijaga demi stabilitas sosial. Ini menciptakan gambaran bahwa tindakan pemerintah yang keras diperlukan untuk mempertahankan ketertiban di tengah ancaman pandemi.
4. **Mitos Legitimasi Kultural:** Kehadiran dua pria yang mengenakan batik di sekitar Mahfud MD memberikan kesan bahwa keputusan pemerintah didukung oleh warisan budaya dan sosial Indonesia. Batik sebagai simbol budaya menciptakan mitos bahwa langkah-langkah pemerintah selaras dengan nilai-nilai kultural yang dihormati oleh masyarakat luas.
5. **Mitos Kepahlawanan Pemerintah:** Narasi tentang pemerintah yang meminta masyarakat untuk kooperatif dan mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran menegaskan mitos kepahlawanan pemerintah dalam menghadapi pandemi. Pemerintah digambarkan sebagai pelindung masyarakat yang berjuang melawan ancaman kesehatan dengan berani dan tegas.
6. **Mitos Perlawanan Terhadap Ketidakpatuhan:** Video kerumunan pendukung Rizieq Shihab yang mengikuti mobil putih menekankan mitos tentang perlawanan terhadap ketidakpatuhan. Ini menciptakan narasi bahwa ada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menolak mengikuti

aturan, dan pemerintah harus bertindak untuk menegakkan disiplin dan protokol kesehatan demi kebaikan bersama.

Kesimpulannya, makna mitos dari gambaran ini memperkuat citra pemerintah yang kuat, tegas, dan berwibawa dalam menjaga kepentingan umum dan melawan ketidakpatuhan. Pemerintah digambarkan sebagai pelindung masyarakat yang bertindak atas dasar nilai-nilai kultural dan demi kepentingan keselamatan bersama, sementara resistensi terhadap tindakan pemerintah dilihat sebagai ancaman terhadap ketertiban dan keamanan.

Sumber : Analisa Peneliti, 2024

Scene 2



Sumber : (KompasTV, 2020c)

Gambar 4. Moeldoko: Apa yang Mau Direkonsiliasi dengan Habib Rizieq Shihab?

Tabel 2. Analisis Video detik 00:00-02:42

Dialog detik 00:00-02:42



Memunculkan narasi tulisan: Pemerintah Rekonsiliasi dengan Habib Rizieq?

Dan terdapat Tulisan Moeldoko: Kepala Kantor Staf Presiden

Menyampaikan Informasi: apa yang di rekonsiliasi dengan Bapak Habib Rizieq kita tidak ada masalah, bahwa saya katakan jika Bapak Habib Rizieq pulang ya pulang saja silahkan, tidak ada masalah apakah kita mencegah tidak, Aparat keamanan justru kita wanti-wanti berjalan baik jangan diganggu, walaupun mereka sendiri yang mengganggu jalan maksudnya, mengganggu public maksudnya, tetepi kita tidak memberikan upaya untuk menekan, menghalangi dan seterusnya, buktinya apa beliau datang sampai rumahnya aman-saja selamat. Jadi kita juga harus lurukan harus clear masyarakat juga harus paham tidak perlu ada yang di rekonsiliasi yang diperlukan disini adalah masing-masing punya hak dan tanggung jawab, Hak sebagai warga apa, tanggung jawab apa, karena negara juga punya tanggung jawab untuk menjalankan semuanya itu agar aturan-aturan itu bisa ditegakan berjalan dengan baik karena apa

negara itu melindungi semuanya bukan hanya melindungi dan memikirkan orang-orang yang suaranya keras, silent mayoritas tidak dipikirkan (tidak juga). Semuanya harus merasakan aman, nyaman untuk itu tugas negara harus menyelenggarakan situasi dengan sebaik-baiknya.

jadi menurut saya istilah rekonsiliasi itu apanya yang direkonsiliasi asalkan kita semua baik-baik bekerja ga ada masalah kan gitu loh, kita bukan pada posisi apa itu (tidak semuanya baik-baik saja), itu mungkin pandangan saya seperti itu, terus bagaimana membangun sebuah hubungan antara warga negara dengan pemerintah, pemerintah harus berposisi seperti apa, warga negara yang baik seperti apa semuanya berjalan baik.

Denotasi	Konotasi
Dalam konteks ini, video menampilkan Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, yang sedang memberikan pidato di hadapan media nasional seperti Metro TV, Berita Satu, iNews, TvOne, dan KompasTV. Dalam pidatonya, Moeldoko didampingi oleh seorang wanita dewasa yang mengenakan masker kesehatan dan pakaian batik berwarna hijau, serta membawa map putih. Teks di layar menunjukkan identitas Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden dan mengangkat narasi tentang kemungkinan rekonsiliasi antara pemerintah dengan Habib Rizieq. Moeldoko dalam pidatonya menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki masalah dengan Habib Rizieq dan tidak ada upaya untuk menghalangi kepulangannya. Dia menekankan bahwa aparat keamanan telah diberi instruksi untuk memastikan perjalanan Habib Rizieq berjalan lancar tanpa gangguan. Moeldoko juga menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan tindakan untuk menekan atau menghalangi kepulangan Habib Rizieq, dan menyatakan bahwa Rizieq tiba di rumahnya dengan selamat. Moeldoko menekankan bahwa tidak ada kebutuhan untuk rekonsiliasi khusus karena masing-masing pihak memiliki hak dan tanggung jawab. Dia menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan demi melindungi semua warganya, termasuk mayoritas yang diam	1. Citra Pemerintah yang Tegas dan Adil: Moeldoko yang berpidato dengan penuh keyakinan di depan media menciptakan kesan bahwa pemerintah bersikap tegas dan adil dalam menangani situasi yang melibatkan Habib Rizieq. Narasi ini memperkuat pandangan bahwa pemerintah bertindak berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku, tanpa memihak atau menekan pihak tertentu. 2. Keteguhan dalam Menegakkan Hukum: Moeldoko menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan dan melindungi semua warganya. Ini menciptakan konotasi bahwa pemerintah berkomitmen untuk menegakkan hukum demi kebaikan bersama, termasuk melindungi hak-hak mayoritas yang diam. Hal ini mencerminkan keteguhan pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan. 3. Kepedulian terhadap Stabilitas dan Keamanan Publik: Penyampaian informasi bahwa aparat keamanan telah diberi instruksi untuk tidak menghalangi kepulangan Habib Rizieq, tetapi untuk memastikan keamanan, menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap stabilitas dan keamanan publik. Ini menciptakan konotasi bahwa pemerintah ingin memastikan semua proses berjalan lancar dan aman bagi semua pihak. 4. Keberanian dalam Menyikapi Isu Kontroversial: Dengan berani menyatakan bahwa tidak ada kebutuhan untuk rekonsiliasi khusus dan bahwa setiap pihak memiliki hak dan tanggung jawab, Moeldoko menegaskan posisi pemerintah yang tidak gentar dalam menghadapi isu-isu kontroversial. Ini menciptakan konotasi bahwa pemerintah memiliki keberanian untuk menyikapi situasi yang rumit dengan jelas dan tegas. 5. Komunikasi Terbuka dan Transparan: Keberadaan berbagai media nasional saat Moeldoko menyampaikan

(silent majority). Dia menyebutkan bahwa tujuan negara adalah memastikan semua warga merasa aman dan nyaman.

Dalam kesimpulannya, Moeldoko menolak istilah "rekonsiliasi" dan menyatakan bahwa hubungan antara warga negara dan pemerintah harus berjalan baik tanpa masalah. Dia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melindungi dan memastikan kesejahteraan semua warga negara, bukan hanya mereka yang vokal.

pidatonya menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan komunikasi yang terbuka dan transparan kepada publik. Ini menciptakan konotasi bahwa pemerintah ingin masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat langsung dari sumber resmi.

Kesimpulan: Analisis konotasi dari pidato Moeldoko menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menampilkan citra sebagai otoritas yang tegas, adil, dan berkomitmen terhadap penegakan hukum. Selain itu, komunikasi yang transparan dan terbuka serta kepedulian terhadap keamanan dan stabilitas publik menjadi pesan utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah ingin memperkuat kepercayaan publik terhadap langkah-langkah yang diambil dalam situasi yang melibatkan tokoh kontroversial seperti Habib Rizieq.

Mitos

1. **Citra Pemerintah yang Bijaksana dan Stabil:** Pidato Moeldoko membangun mitos bahwa pemerintah bertindak dengan bijaksana dan stabil dalam menghadapi situasi yang melibatkan tokoh kontroversial seperti Habib Rizieq. Dengan menegaskan bahwa tidak ada masalah yang memerlukan rekonsiliasi khusus, pemerintah memproyeksikan diri sebagai otoritas yang mampu mengendalikan situasi tanpa harus menunjukkan ketegangan atau konflik.
2. **Negara sebagai Pelindung dan Penegak Hukum:** Moeldoko menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua warganya dan menegakkan aturan. Ini menciptakan mitos bahwa pemerintah adalah pelindung yang adil bagi semua orang, bukan hanya kelompok tertentu yang bersuara keras. Dengan menegakkan hukum tanpa memihak, pemerintah memperkuat citra sebagai entitas yang berkomitmen terhadap keadilan dan ketertiban.
3. **Harmonisasi Hubungan Pemerintah dan Warga Negara:** Pidato Moeldoko menciptakan mitos tentang hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga negara. Dengan menyatakan bahwa semua pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi, pemerintah membangun narasi bahwa setiap warga negara dan pemerintah dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua.
4. **Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab dan Transparan:** Dengan berbicara di depan berbagai media nasional, Moeldoko menegaskan keterbukaan dan transparansi pemerintah dalam menyikapi isu-isu penting. Ini menciptakan mitos tentang kepemimpinan yang bertanggung jawab, yang selalu memberikan informasi yang jelas dan langsung kepada publik, menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki agenda tersembunyi.
5. **Negara yang Mengedepankan Kepentingan Umum:** Penekanan Moeldoko pada pentingnya melindungi kepentingan umum, termasuk mayoritas yang diam, membangun mitos bahwa pemerintah selalu mempertimbangkan kesejahteraan seluruh rakyat. Ini memperkuat pandangan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah selalu ditujukan untuk kebaikan bersama dan menjaga stabilitas nasional.

Kesimpulan: Analisis mitos dari pidato Moeldoko menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membangun citra sebagai otoritas yang bijaksana, adil, dan stabil. Dengan menekankan penegakan hukum, transparansi, dan kepedulian terhadap kepentingan umum, pemerintah ingin memperkuat kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa tindakan yang diambil dalam situasi yang melibatkan tokoh kontroversial adalah demi kebaikan dan stabilitas nasional. Narasi ini membantu menciptakan mitos tentang pemerintah sebagai pelindung dan penegak hukum yang bertanggung jawab dan transparan.

Sumber : Analisa Peneliti, 2024

Scene 3



Sumber : (KompasTV, 2020a)

Gambar 5. FPI Tak Terima Penolakan Kedatangan Rizieq Shihab

Tabel 3

Analisis Video detik 00:00-02:42



Dialog detik 00:00-02:42



Dialog detik 00:47-01:37

Narasi bertuliskan: Ricuh deklarasi tolak kedatangan Rizieq Shihab di Riau

Narator menyampaikan (Sawirno Adi Kompas TV, Pekanbaru Riau): Deklarasi menolak kedatangan Rizieq Shihab di Pekanbaru pada senin kemarin berlangsung ricuh, itu terjadi pada saat anggota FPI datang dan tak terima dengan deklarsi tolak kedatangan Rizieq Shihab de depan kantor Gubernur Riau.

Untuk menghindari bentrok dari kedua kelompok polisi berupaya membubarkan massa FPI, sebelum Ricuh terjadi menolak kedatangan Rizieq Shihab dilakukan oleh sejumlah ormas Badan Eksekutif Mahasiswa oleh sejumlah kampus dan organisasi kepemudaan di Pekanbaru Deklarasi dilakukan untuk menjaga suasana kondusif yang selama ini terjaga di Riau.

Rusli Ahmad Ketua PWNU Riau menyampaikan: Kami menyampaikan bahwa 45 elemen bersepakat untuk menolak kedatangan seorang Habib Rizieq beserta kawan-kawannya datang kebumi Rancang kuning ini demi kenyamanan, kesejukan sesuai dengan budaya melayu bahwa kita ini saling menghargai, menghormati, sehingga bineka tunggal ika NKRI ini tetap nyaman, aman, tentram sebagaimana yang kita rasakan selama ini.

Narator menyampaikan Kembali (Sawirno Adi Kompas TV, Pekanbaru Riau): sejak kepulangan

Rizieq Shihab dan terjadi kerumunan di sejumlah tempat di Jakarta, unjuk rasa penolakan Rizieq Shihab terus terjadi di sejumlah daerah.

Denotasi	Konotasi
1. Narasi Teks dan Video: a. Narasi bertuliskan "Ricuh deklarasi tolak kedatangan Rizieq Shihab di Riau" memperkenalkan isi video yang menampilkan kericuhan di depan Kantor Gubernur Riau. b. Video tersebut menunjukkan adegan kericuhan di jalan di mana beberapa pria terlibat dan lainnya mencoba meleraikan. 2. Narator Melaporkan: a. Narator, Sawirno Adi dari Kompas TV, melaporkan dari Pekanbaru, Riau, bahwa deklarasi penolakan kedatangan Rizieq Shihab di Pekanbaru pada hari Senin kemarin berakhir ricuh. Kericuhan ini terjadi ketika anggota FPI tiba dan tidak terima dengan deklarasi penolakan kedatangan Rizieq Shihab di depan Kantor Gubernur Riau. b. Polisi berusaha membubarkan massa FPI untuk menghindari bentrokan antara kedua kelompok. Sebelum kericuhan, penolakan terhadap kedatangan Rizieq Shihab dilakukan oleh beberapa ormas, Badan Eksekutif Mahasiswa dari beberapa kampus, dan organisasi kepemudaan di Pekanbaru. Deklarasi tersebut bertujuan untuk menjaga suasana kondusif yang selama ini terjaga di Riau. 3. Wawancara dengan Ketua PWNU Riau: Seorang pria dewasa, Rusli Ahmad, Ketua PWNU Riau, berdiri di pinggir jalan dan menyampaikan bahwa 45 elemen masyarakat bersepakat untuk menolak kedatangan Habib Rizieq beserta kawan-kawannya di bumi Rancang Kuning demi kenyamanan dan kesejahteraan. Dia menekankan bahwa sesuai dengan budaya Melayu, masyarakat saling menghargai dan menghormati sehingga Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI tetap nyaman, aman, dan tenteram sebagaimana yang dirasakan selama ini. 4. Narator Melaporkan Kembali: Narator kembali menyampaikan bahwa sejak kepulangan Rizieq Shihab dan terjadinya kerumunan di beberapa tempat di Jakarta, unjuk rasa penolakan terhadap Rizieq Shihab terus terjadi di berbagai daerah. Video kembali menampilkan kericuhan di jalan dengan beberapa pria yang mencoba	1. Narasi Teks dan Video: a. Narasi Bertuliskan "Ricuh Deklarasi Tolak Kedatangan Rizieq Shihab di Riau": Konotasi ini menciptakan kesan adanya konflik dan ketegangan di masyarakat akibat kedatangan Rizieq Shihab. Penggunaan kata "ricuh" menekankan adanya kekacauan dan ketidakteraturan, yang dapat memperkuat persepsi negatif tentang situasi yang terjadi. b. Video Kericuhan di Jalan: Adegan kericuhan di jalan memperkuat citra bahwa situasi tersebut tidak terkendali dan menunjukkan adanya perpecahan dalam masyarakat. Hal ini menyoroti dampak kedatangan Rizieq Shihab terhadap keamanan dan ketertiban publik. 2. Narator Melaporkan**: a. Deklarasi Penolakan Kedatangan Rizieq Shihab: Laporan narator tentang deklarasi penolakan kedatangan Rizieq Shihab mengkonotasikan adanya penolakan yang signifikan terhadap Rizieq Shihab di Riau. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan Rizieq Shihab dianggap mengancam ketertiban dan keharmonisan masyarakat setempat. b. Upaya Polisi untuk Membubarkan Massa FPI: Polisi yang berusaha membubarkan massa FPI menciptakan konotasi bahwa tindakan pemerintah bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mencegah bentrokan. Ini memperlihatkan peran aparat keamanan sebagai penjaga ketertiban di tengah konflik yang terjadi. 3. Wawancara dengan Ketua PWNU Riau: a. Penolakan Kedatangan Rizieq Shihab oleh 45 Elemen Masyarakat: Pernyataan Ketua PWNU Riau bahwa 45 elemen masyarakat menolak kedatangan Rizieq Shihab mengkonotasikan adanya dukungan luas dari berbagai kelompok terhadap penolakan tersebut. Ini menggambarkan bahwa penolakan ini bukan hanya dari satu pihak, tetapi merupakan konsensus dari berbagai elemen masyarakat yang menginginkan kedamaian dan ketenangan. b. Menjaga Budaya Melayu dan Bhinneka Tunggal Ika: Penekanan pada nilai-nilai budaya Melayu dan Bhinneka Tunggal Ika menciptakan konotasi bahwa penolakan ini

melerai, serta polisi yang bertindak di area kericuhan.

Kesimpulan denotasi: Laporan ini menggambarkan situasi kericuhan di Pekanbaru akibat penolakan kedatangan Rizieq Shihab oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk ormas, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan, yang berujung pada tindakan polisi untuk membubarkan massa demi menjaga ketertiban.

didasarkan pada upaya untuk mempertahankan harmoni sosial dan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini juga menggambarkan bahwa kedatangan Rizieq Shihab dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

4. **Narator Melaporkan Kembali:**

- a. **Penolakan Terhadap Rizieq Shihab Terus Terjadi di Berbagai Daerah:** Laporan bahwa penolakan terhadap Rizieq Shihab terus terjadi di berbagai daerah menekankan bahwa ketidakpuasan terhadap Rizieq Shihab bersifat luas dan menyebar. Ini mengkonotasikan adanya gelombang penolakan nasional yang memperkuat persepsi negatif terhadap kehadiran Rizieq Shihab di berbagai komunitas.

Kesimpulan Konotasi: Analisis konotasi dari laporan ini menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat citra negatif tentang kedatangan Rizieq Shihab dan dampaknya terhadap masyarakat. Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat digambarkan sebagai pihak yang berusaha menjaga ketertiban dan keharmonisan di tengah ancaman perpecahan. Penolakan terhadap Rizieq Shihab dikonotasikan sebagai langkah yang didukung luas oleh masyarakat demi menjaga nilai-nilai kebersamaan dan stabilitas sosial.

Mitos

1. **Pemerintah sebagai Penjaga Ketertiban:** Mitos ini menciptakan gambaran bahwa pemerintah selalu bertindak sebagai pelindung ketertiban dan keamanan publik. Dalam situasi di mana terjadi kericuhan akibat kedatangan Rizieq Shihab, pemerintah (melalui aparat kepolisian) dilihat sebagai pihak yang berusaha mencegah konflik dan menjaga stabilitas. Ini memperkuat narasi bahwa pemerintah adalah entitas yang netral dan bertanggung jawab dalam menghadapi permasalahan sosial.
2. **Tokoh Kontroversial sebagai Ancaman:** Rizieq Shihab digambarkan sebagai tokoh yang membawa kekacauan dan mengancam ketenangan masyarakat. Mitos ini memperkuat pandangan bahwa kedatangan tokoh kontroversial seperti Rizieq Shihab bisa memicu konflik dan ketidakstabilan. Dengan demikian, penolakan terhadap kedatangannya dianggap sebagai tindakan yang wajar dan diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial.
3. **Konsensus Sosial untuk Kestabilan:** Deklarasi penolakan kedatangan Rizieq Shihab oleh berbagai elemen masyarakat menunjukkan adanya kesepakatan luas bahwa kehadirannya tidak diinginkan. Mitos ini menciptakan kesan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang seragam tentang pentingnya menjaga stabilitas dan ketertiban, dan bahwa penolakan ini adalah cerminan dari kehendak kolektif demi kebaikan bersama.
4. **Budaya dan Nilai Lokal sebagai Landasan:** Pernyataan Ketua PWNU Riau tentang budaya Melayu dan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan bahwa nilai-nilai lokal adalah fondasi penting yang harus dijaga. Mitos ini menegaskan bahwa mempertahankan kebudayaan dan keharmonisan lokal adalah prioritas, dan bahwa kedatangan tokoh yang dianggap dapat mengganggu nilai-nilai tersebut harus ditolak. Ini memperkuat narasi bahwa identitas budaya lokal dan kesatuan nasional adalah hal yang sakral dan harus dilindungi.
5. **Pemerintah sebagai Pelindung Semua Warga:** Dengan menekankan bahwa negara bertugas melindungi semua warganya, termasuk mayoritas yang diam, mitos ini memperkuat pandangan

bahwa pemerintah bertindak untuk kepentingan semua pihak, bukan hanya kelompok vokal atau kontroversial. Ini menegaskan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah berorientasi pada kesejahteraan dan keamanan seluruh rakyat.

Kesimpulan Mitos: Analisis mitos dari laporan ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memperkuat narasi tentang perannya sebagai penjaga ketertiban dan pelindung masyarakat. Tokoh kontroversial seperti Rizieq Shihab digambarkan sebagai ancaman terhadap stabilitas, sehingga penolakan terhadap kedatangannya dianggap sebagai langkah yang diperlukan dan didukung oleh konsensus sosial. Nilai-nilai budaya dan kesatuan nasional juga dijadikan landasan untuk membenarkan tindakan tersebut, memperkuat persepsi bahwa menjaga harmoni dan ketertiban adalah prioritas utama bagi pemerintah dan masyarakat luas.

Makna Denotasi pada Komunikasi Dakwah Front Pembela Islam (FPI) Melalui Habib Rizieq Shihab Pada Sikap Politik Pemerintah

Denotasi Tabel 1:

Seorang pria dewasa berkacamata yang sedang memberikan pidato didampingi oleh dua pria dewasa lainnya, dengan teks yang menunjukkan identitasnya sebagai Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Mahfud MD menyampaikan informasi bahwa pemerintah menyesalkan sikap Rizieq Shihab, pemimpin FPI, yang menolak tracing Covid-19. Sementara Mahfud MD berbicara, video lain ditampilkan, memperlihatkan kerumunan orang berpakaian putih yang mengikuti sebuah mobil putih secara ramai, di mana di dalam mobil tersebut terdapat seorang pria dewasa berpakaian putih yang diidentifikasi sebagai Rizieq Shihab. Teks pada video ini menyatakan bahwa pemerintah sangat

menyesalkan sikap Rizieq Shihab yang menolak tracing Covid-19 dan bahwa Rizieq pernah melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19.

Video tersebut menampilkan Mahfud MD yang menekankan pentingnya masyarakat untuk kooperatif dalam penanganan Covid-19 dan menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Teks lain yang muncul mengulangi permintaan pemerintah agar masyarakat kooperatif dalam penanganan virus corona. Video kembali menunjukkan kerumunan orang yang mengikuti mobil putih dengan Rizieq Shihab di dalamnya, menyoroti sikap pemimpin FPI yang menolak penelusuran kontak oleh Satgas Covid-19.

Analisis tabel 1 ini menunjukkan bahwa teks tersebut membangun narasi konflik antara pemerintah dan FPI, di mana

pemerintah digambarkan sebagai otoritas yang bertanggung jawab dalam menangani pandemi, sementara FPI dan Rizieq Shihab dianggap sebagai pihak yang menentang langkah-langkah pemerintah, termasuk dalam hal tracing dan penelusuran kontak Covid-19. Konflik ini menciptakan ketegangan dalam dinamika politik dan dapat memengaruhi persepsi masyarakat serta kebijakan publik terkait penanganan pandemi.

Denotasi Tabel 2:

Dalam konteks ini, video menampilkan Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, yang sedang memberikan pidato di hadapan media nasional seperti Metro TV, Berita Satu, iNews, TvOne, dan KompasTV. Dalam pidatonya, Moeldoko didampingi oleh seorang wanita dewasa yang mengenakan masker kesehatan dan pakaian batik berwarna hijau, serta membawa map putih. Teks di layar menunjukkan identitas Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden dan mengangkat narasi tentang kemungkinan rekonsiliasi antara pemerintah dengan Habib Rizieq.

Moeldoko dalam pidatonya menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki masalah dengan Habib Rizieq dan tidak ada upaya untuk menghalangi kepulangannya. Dia

menekankan bahwa aparat keamanan telah diberi instruksi untuk memastikan perjalanan Habib Rizieq berjalan lancar tanpa gangguan. Moeldoko juga menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan tindakan untuk menekan atau menghalangi kepulangan Habib Rizieq, dan menyatakan bahwa Rizieq tiba di rumahnya dengan selamat.

Moeldoko menekankan bahwa tidak ada kebutuhan untuk rekonsiliasi khusus karena masing-masing pihak memiliki hak dan tanggung jawab. Dia menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan demi melindungi semua warganya, termasuk mayoritas yang diam (*silent majority*). Dia menyebutkan bahwa tujuan negara adalah memastikan semua warga merasa aman dan nyaman.

Dalam kesimpulannya, Moeldoko menolak istilah "rekonsiliasi" dan menyatakan bahwa hubungan antara warga negara dan pemerintah harus berjalan baik tanpa masalah. Dia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melindungi dan memastikan kesejahteraan semua warga negara, bukan hanya mereka yang vokal. Tabel 2 menggambarkan narasi yang dibangun oleh pemerintah, melalui Moeldoko, terkait sikap politik terhadap kepulangan Habib Rizieq Shihab dan Front

Pembela Islam (FPI). Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah tidak menghalangi keputusannya Rizieq Shihab dan menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi semua warganya. Dengan pendekatan Roland Barthes, analisis menyoroti bagaimana narasi ini menciptakan pemisahan antara pemerintah (sebagai penegak hukum dan pembela kepentingan negara) dan FPI (sebagai tokoh oposisi). Kesimpulannya, narasi ini mencerminkan dinamika kekuasaan dan ideologi yang mendasari konflik politik antara pemerintah dan FPI dalam konteks keputusannya Rizieq Shihab.

Denotasi Tabel 3:

Analisa ini menggambarkan situasi keributan di Pekanbaru akibat penolakan kedatangan Rizieq Shihab oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk ormas, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan, yang berujung pada tindakan polisi untuk membubarkan massa demi menjaga ketertiban. Tabel 3 Menggambarkan situasi keributan di Pekanbaru sebagai akibat penolakan kedatangan Habib Rizieq Shihab oleh sejumlah kelompok masyarakat, yang memunculkan respons dari pihak keamanan untuk menjaga ketertiban. Dalam konteks Komunikasi Dakwah Front Pembela Islam

(FPI) melalui Rizieq Shihab pada sikap politik pemerintah, situasi ini menciptakan konflik antara kepentingan FPI dalam menyebarkan ajaran Islam konservatif dan kepentingan pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial. Analisis dengan pendekatan Roland Barthes menyoroti bagaimana narasi ini menciptakan representasi yang berbeda antara FPI dan pemerintah, serta bagaimana keduanya menggunakan retorika untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

Secara keseluruhan, ketiga tabel memberikan gambaran tentang dinamika kompleks antara pemerintah dan Front Pembela Islam (FPI), yang diwakili oleh Habib Rizieq Shihab, dalam konteks penanganan pandemi Covid-19 dan keputusannya Rizieq Shihab ke Indonesia. Tabel 1 menyoroti konflik antara pemerintah yang berupaya menangani pandemi dengan langkah-langkah tertentu, sementara FPI menentangnya. Tabel 2 menegaskan pemisahan antara pemerintah dan FPI, dengan pemerintah menyatakan tanggung jawabnya untuk melindungi warganya tanpa menghalangi keputusannya Rizieq Shihab. Sementara Tabel 3 mencerminkan konflik yang timbul dari penolakan kedatangan Rizieq Shihab oleh sebagian masyarakat, yang berujung pada keributan dan respons

keamanan. Secara keseluruhan, analisis ketiga tabel ini mencerminkan kompleksitas dalam dinamika politik, ideologis, dan sosial yang melibatkan pemerintah dan FPI, dan bagaimana retorika keduanya membentuk persepsi publik dan kebijakan yang terkait.

Makna Konotatif Komunikasi Dakwah Front Pembela Islam (FPI) Melalui Habib Rizieq Shihab Pada Sikap Politik Pemerintah

Konotasi Tabel 1:

Makna konotasi dari gambaran ini mencerminkan dinamika kompleks antara otoritas pemerintah, kepatuhan masyarakat, ketegasan dalam penegakan hukum, konflik sosial, serta simbolisme religius dalam konteks penanganan pandemi Covid-19. Tabel 1 mencerminkan dinamika kompleks antara otoritas pemerintah, kepatuhan masyarakat, ketegasan dalam penegakan hukum, konflik sosial, serta simbolisme religius dalam konteks penanganan pandemi Covid-19. Dalam analisis Komunikasi Dakwah Front Pembela Islam (FPI) melalui Habib Rizieq Shihab pada sikap politik pemerintah dengan pendekatan Roland Barthes, konotasi tersebut menggambarkan bagaimana Komunikasi Dakwah FPI dan respons pemerintah tercermin dalam simbol, narasi, dan mitos yang dibangun oleh kedua

belah pihak. Kesimpulannya, konotasi ini menyoroti kompleksitas hubungan antara pemerintah dan FPI dalam konteks penanganan pandemi, yang mencerminkan konflik politik yang melibatkan aspek-aspek seperti otoritas, kepatuhan, hukum, konflik sosial, dan simbolisme agama.

Konotasi Tabel 2:

Analisis konotasi dari pidato Moeldoko menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menampilkan citra sebagai otoritas yang tegas, adil, dan berkomitmen terhadap penegakan hukum. Selain itu, komunikasi yang transparan dan terbuka serta kepedulian terhadap keamanan dan stabilitas publik menjadi pesan utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah ingin memperkuat kepercayaan publik terhadap langkah-langkah yang diambil dalam situasi yang melibatkan tokoh kontroversial seperti Habib Rizieq. Tabel 2 menggambarkan usaha pemerintah untuk memperkuat citra sebagai otoritas yang tegas dan adil dalam menghadapi situasi yang melibatkan Habib Rizieq Shihab. Melalui pidato Moeldoko, pemerintah menekankan transparansi, kepedulian terhadap keamanan publik, dan komitmen terhadap penegakan hukum sebagai pesan utama. Pendekatan Roland

Barthes memungkinkan kita untuk melihat bagaimana pesan-pesan ini membangun narasi yang memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam konteks dinamika politik dengan FPI. Kesimpulannya, konotasi tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk mempertahankan legitimasinya dan mengatasi tantangan politik yang dihadapi.

Konotasi Tabel 3:

Makna konotasi menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat citra negatif tentang kedatangan Rizieq Shihab dan dampaknya terhadap masyarakat. Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat digambarkan sebagai pihak yang berusaha menjaga ketertiban dan keharmonisan di tengah ancaman perpecahan. Penolakan terhadap Rizieq Shihab dikonotasikan sebagai langkah yang didukung luas oleh masyarakat demi menjaga nilai-nilai kebersamaan dan stabilitas sosial. Tabel 3 menunjukkan upaya untuk memperkuat citra negatif tentang kedatangan Rizieq Shihab dan dampaknya terhadap masyarakat. Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat digambarkan sebagai pihak yang berusaha menjaga ketertiban dan keharmonisan di tengah ancaman perpecahan. Penolakan terhadap Rizieq Shihab dikonotasikan

sebagai langkah yang didukung luas oleh masyarakat demi menjaga nilai-nilai kebersamaan dan stabilitas sosial. Dengan pendekatan Roland Barthes, analisis menyoroti bagaimana narasi ini menciptakan representasi tentang konflik sosial, peran pemerintah, dan persepsi terhadap Front Pembela Islam (FPI). Kesimpulannya, konotasi ini menggambarkan bagaimana Komunikasi Dakwah FPI melalui Habib Rizieq Shihab dipahami dan merespons oleh masyarakat dan pemerintah dalam konteks dinamika sosial-politik yang kompleks.

Secara keseluruhan, konotasi dari ketiga tabel mencerminkan dinamika kompleks antara pemerintah dan Front Pembela Islam (FPI) dalam konteks penanganan pandemi Covid-19 dan kepulangan Habib Rizieq Shihab. Tabel 1 menyoroti konflik antara pemerintah dan FPI terkait langkah-langkah penanganan pandemi, menekankan otoritas, kepatuhan, ketegasan hukum, konflik sosial, dan simbolisme religius. Tabel 2 menggambarkan upaya pemerintah untuk mempertahankan citra sebagai otoritas yang tegas dan adil, dengan menekankan transparansi, keamanan publik, dan penegakan hukum. Sementara itu, Tabel 3 menunjukkan upaya untuk memperkuat citra

negatif tentang kedatangan Rizieq Shihab dan respons pemerintah terhadap kericuhan yang terjadi, serta bagaimana narasi ini dipahami dan merespons oleh masyarakat. Secara keseluruhan, konotasi ini memperlihatkan kompleksitas dalam hubungan antara pemerintah dan FPI, serta bagaimana Komunikasi Dakwah FPI melalui Habib Rizieq Shihab tercermin dalam respons pemerintah dan persepsi masyarakat.

Mitos Komunikasi Dakwah Front Pembela Islam (FPI) Melalui Habib Rizieq Shihab Pada Sikap Politik Pemerintah

Mitos Tabel 1:

Analisa mitos dari gambaran ini memperkuat citra pemerintah yang kuat, tegas, dan berwibawa dalam menjaga kepentingan umum dan melawan ketidakpatuhan. Pemerintah digambarkan sebagai pelindung masyarakat yang bertindak atas dasar nilai-nilai kultural dan demi kepentingan keselamatan bersama, sementara resistensi terhadap tindakan pemerintah dilihat sebagai ancaman terhadap ketertiban dan keamanan. Tabel 1 Memperkuat citra pemerintah sebagai entitas yang kuat, tegas, dan berwibawa dalam menjaga kepentingan umum serta melawan ketidakpatuhan. Pemerintah digambarkan

sebagai pelindung masyarakat yang bertindak berdasarkan nilai-nilai kultural dan demi kepentingan keselamatan bersama. Penolakan terhadap tindakan pemerintah dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban dan keamanan. Dengan pendekatan Roland Barthes, analisis mitos ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana Komunikasi Dakwah Front Pembela Islam (FPI) melalui Habib Rizieq Shihab dipahami dan merespons oleh masyarakat dan pemerintah dalam konteks dinamika sosial-politik yang kompleks.

Mitos Tabel 2:

Analisis mitos dari pidato Moeldoko menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membangun citra sebagai otoritas yang bijaksana, adil, dan stabil. Dengan menekankan penegakan hukum, transparansi, dan kepedulian terhadap kepentingan umum, pemerintah ingin memperkuat kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa tindakan yang diambil dalam situasi yang melibatkan tokoh kontroversial adalah demi kebaikan dan stabilitas nasional. Narasi ini membantu menciptakan mitos tentang pemerintah sebagai pelindung dan penegak hukum yang bertanggung jawab dan transparan. Tabel 2 Menciptakan citra pemerintah sebagai

otoritas yang bijaksana, adil, dan stabil dalam menghadapi situasi yang melibatkan tokoh kontroversial seperti Habib Rizieq Shihab. Dengan menekankan penegakan hukum, transparansi, dan kepedulian terhadap kepentingan umum, pemerintah ingin memperkuat kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa tindakan yang diambil dalam konteks ini adalah demi kebaikan dan stabilitas nasional. Narasi ini membantu menciptakan mitos tentang pemerintah sebagai pelindung dan penegak hukum yang bertanggung jawab dan transparan. Dengan pendekatan Roland Barthes, analisis mitos ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana Komunikasi Dakwah Front Pembela Islam (FPI) melalui Habib Rizieq Shihab dipahami dan merespons oleh masyarakat dan pemerintah dalam konteks dinamika sosial-politik yang kompleks.

Mitos Tabel 3:

Analisis mitos menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memperkuat narasi tentang perannya sebagai penjaga ketertiban dan pelindung masyarakat. Tokoh kontroversial seperti Rizieq Shihab digambarkan sebagai ancaman terhadap stabilitas, sehingga penolakan terhadap kedatangannya dianggap sebagai langkah yang diperlukan dan didukung oleh

konsensus sosial. Nilai-nilai budaya dan kesatuan nasional juga dijadikan landasan untuk membenarkan tindakan tersebut, memperkuat persepsi bahwa menjaga harmoni dan ketertiban adalah prioritas utama bagi pemerintah dan masyarakat luas. Tabel 3 Memperkuat narasi tentang peran pemerintah sebagai penjaga ketertiban dan pelindung masyarakat, dengan menempatkan penolakan terhadap Rizieq Shihab sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas. Tokoh kontroversial seperti Rizieq Shihab digambarkan sebagai ancaman terhadap stabilitas, sehingga penolakan terhadap kedatangannya dianggap sebagai langkah yang didukung oleh konsensus sosial. Dengan menggunakan nilai-nilai budaya dan kesatuan nasional sebagai landasan, tindakan ini dipertimbangkan sebagai prioritas utama bagi pemerintah dan masyarakat luas dalam menjaga harmoni dan ketertiban. Dengan pendekatan Roland Barthes, analisis mitos ini membuka pemahaman tentang bagaimana Komunikasi Dakwah Front Pembela Islam (FPI) melalui Habib Rizieq Shihab dipahami dan merespons oleh masyarakat dan pemerintah dalam dinamika sosial-politik yang kompleks.

Secara keseluruhan, mitos yang

tergambar dari ketiga tabel menggambarkan upaya pemerintah untuk memperkuat citra sebagai otoritas yang kuat, bijaksana, dan stabil dalam menghadapi situasi yang melibatkan Habib Rizieq Shihab dan Front Pembela Islam (FPI). Pemerintah digambarkan sebagai pelindung masyarakat yang bertindak atas dasar nilai-nilai kultural dan kepentingan keselamatan bersama, sementara penolakan terhadap tindakan pemerintah dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban dan keamanan. Narasi ini membantu menciptakan persepsi tentang pemerintah sebagai penjaga ketertiban dan keharmonisan, serta menempatkan tokoh kontroversial seperti Rizieq Shihab sebagai ancaman terhadap stabilitas. Dengan

menggunakan nilai-nilai budaya dan kesatuan nasional sebagai landasan, tindakan pemerintah dipertimbangkan sebagai prioritas utama bagi stabilitas sosial. Melalui pendekatan Roland Barthes, analisis mitos ini memberikan pemahaman tentang bagaimana Komunikasi Dakwah FPI melalui Habib Rizieq Shihab dipahami dan merespons oleh masyarakat dan pemerintah dalam dinamika sosial-politik yang kompleks.

Komunikasi dakwah Habib Rizieq Shihab melalui pemberitaan media dengan menggunakan semiotika Roland Barthes ditemukan pola representasi yang konsisten dalam membangun makna denotasi, konotasi, dan mitos.

1. Analisis Makna Denotasi

Tabel 4. Rekapitulasi Analisis Denotasi Tiga Video Pemberitaan

Video	Elemen yang Diamati	Makna Denotasi
Video 1: Mahfud MD	- Mahfud MD (Menko Polhukam) memberikan pidato didampingi dua pria - Teks: "Pemerintah Sangat Sesalkan Sikap Pemimpin FPI Rizieq Shihab yang menolak tracing Covid-19" - Visual: Kerumunan massa berpakaian putih mengikuti mobil putih yang ditumpangi Rizieq	Pejabat pemerintah menyatakan penyesalan resmi terhadap sikap Rizieq yang menolak prosedur kesehatan; massa pendukung FPI berkumpul di lokasi
Video 2: Moeldoko	- Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) memberi pernyataan di hadapan media - Teks: "Apa yang Mau Direkonsiliasi dengan Habib Rizieq?" - Visual: Moeldoko didampingi staf berpakaian batik	Pejabat pemerintah menegaskan tidak ada masalah khusus yang perlu direkonsiliasi dengan Habib Rizieq; pemerintah bersikap netral
Video 3: Ricuh	- Narasi: Deklarasi penolakan kedatangan Rizieq di Pekanbaru berujung ricuh	Terjadi konflik fisik antara pendukung dan penolak Rizieq

Deklarasi	- Visual: Kericuhan di jalan, polisi di Riau; polisi bertindak membubarkan massa menjaga ketertiban; ada konsensus masyarakat menolak kedatangan Rizieq
------------------	---

Sumber : Analisa Peneliti, 2024

Secara denotatif, ketiga video berbagai daerah). Pemerintah menggambarkan konflik terbuka antara direpresentasikan sebagai otoritas yang pemerintah dan FPI dalam tiga dimensi: (1) mengeluarkan pernyataan resmi, sementara konflik kebijakan publik (penolakan tracing FPI dan Habib Rizieq direpresentasikan Covid-19), (2) konflik narasi politik melalui visual massa dan simbol-simbol (rekonsiliasi versus penegakan hukum), dan keagamaan. (3) konflik sosial (kericuhan massa di

2. Analisis Makna Konotasi

Tabel 5. Rekapitulasi Analisis Konotasi Tiga Video Pemberitaan

Video	Tanda Konotatif	Makna Konotasi
Video 1	- Mahfud MD berkacamata, formal - Narasi “menyesalkan” - Massa berpakaian putih - Mobil putih	Otoritas dan kredibilitas pemerintah; ketegasan terhadap pelanggaran; simbolisme kesucian dan ketaatan religius pendukung FPI; konflik antara kepentingan publik dan kepentingan kelompok
Video 2	- Moeldoko berbicara di depan banyak media - Batik sebagai pakaian staf - Penolakan istilah "rekonsiliasi"	Transparansi dan keterbukaan pemerintah; identitas budaya Indonesia; pemerintah sebagai penegak hukum yang tidak memihak; silent majority sebagai pertimbangan kebijakan
Video 3	- "Ricu" dalam narasi - Polisi membubarkan massa - Pernyataan Ketua PWNU tentang budaya Melayu	Kekacauan dan ketidakteraturan akibat kedatangan Rizieq; pemerintah sebagai penjaga stabilitas; penolakan berbasis nilai-nilai lokal dan kebhinekaan

Sumber : Analisa Peneliti, 2024

Secara konotatif, pemberitaan (pakaian putih, mobil putih) yang seharusnya membangun narasi yang memperkuat posisi menjadi bagian dari komunikasi dakwah pemerintah sebagai otoritas yang sah dan justru dikonotasikan sebagai simbol bertanggung jawab, sementara Habib Rizieq perlawanan terhadap otoritas negara. dan FPI dikonotasikan sebagai pihak yang Pemerintah dikonotasikan sebagai pelindung membawa kekacauan dan mengancam kepentingan umum (termasuk *silent ketertiban publik. Simbol-simbol keagamaan majority*), sementara FPI dikonotasikan

sebagai kelompok yang mengutamakan kepentingan sektoral.

3. Analisis Mitos

Tabel 6 Rekapitulasi Analisis Mitos Tiga Video Pemberitaan

Mitos	Penjelasan	Dasar Konstruksi
Mitos 1: Pemerintah sebagai Pelindung dan Penegak Hukum	Pemerintah direpresentasikan sebagai otoritas yang tegas, adil, dan berwibawa dalam menjaga kepentingan umum dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu	Pidato resmi Mahfud MD dan Moeldoko; narasi tentang tindakan tegas terhadap pelanggar; penekanan pada perlindungan silent majority
Mitos 2: Habib Rizieq sebagai Ancaman Stabilitas	Habib Rizieq dan FPI direpresentasikan sebagai tokoh/kelompok yang membawa kekacauan, mengancam ketertiban, dan menolak aturan negara	Visual kerumunan massa; narasi "ricuh"; pemberitaan tentang penolakan tracing; konflik di berbagai daerah
Mitos 3: Konflik Agama-Politik sebagai Pertarungan Nilai	Konflik antara pemerintah dan FPI direpresentasikan sebagai pertarungan antara kepatuhan hukum (nilai negara) versus perlawanan ideologis (nilai agama) yang mengancam kebhinekaan	Simbolisme agama (pakaian putih) versus simbolisme negara (batik, seragam); narasi tentang menjaga budaya Melayu dan NKRI

Sumber : Analisa Peneliti, 2024

Ketiga mitos tersebut bekerja secara bersamaan untuk membentuk narasi hegemonik tentang relasi antara pemerintah dan FPI. Mitos pertama dan kedua saling memperkuat: pemerintah sebagai pelindung yang sah, sementara Habib Rizieq sebagai ancaman yang harus dilindungi masyarakat darinya. Mitos ketiga menambahkan dimensi ideologis dengan membingkai konflik sebagai pertarungan antara nilai-nilai negara (hukum, kebhinekaan) dan nilai-nilai kelompok (ideologi agama yang eksklusif).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan media tentang komunikasi dakwah Habib Rizieq tidak sekadar melaporkan peristiwa, tetapi secara aktif mengkonstruksi realitas sosial melalui

pemilihan tanda, framing, dan narasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Barthes (2007) bahwa mitos adalah bentuk komunikasi yang menaturalisasi makna ideologis sehingga diterima sebagai kebenaran. Dalam konteks ini, media berperan sebagai *myth-maker* yang membentuk persepsi publik tentang relasi antara agama dan politik di Indonesia.

Temuan ini memperkuat penelitian Yuningrum (2018) tentang mitos politik dalam kasus pembubaran HTI, yang menunjukkan bagaimana media membangun narasi tentang ancaman ideologi terhadap negara. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa dalam kasus FPI, mitos yang dibangun tidak

hanya tentang ancaman ideologis, tetapi juga tentang kontestasi antara otoritas negara dan otoritas keagamaan. Hal ini sejalan dengan temuan Fathimatuazzahra dan Hilmy (2020) tentang populisme religius, tetapi dengan penekanan pada peran media dalam mengamplifikasi kontestasi tersebut.

Penelitian ini juga memperkaya kajian Woodward et al. (2014) tentang pola kekerasan religius FPI, dengan menunjukkan bahwa representasi media turut membentuk persepsi publik tentang FPI sebagai kelompok yang identik dengan kekerasan dan konflik. Namun, berbeda dengan penelitian tersebut yang fokus pada aksi langsung FPI, penelitian ini mengungkap bagaimana media - melalui pilihan tanda dan narasi - memperkuat citra negatif tersebut.

Refleksi Kritis dari penelitian ini adalah bahwa komunikasi dakwah Habib Rizieq - yang seharusnya menjadi fokus utama penelitian berdasarkan judul - justru tidak banyak direpresentasikan dalam pemberitaan. Elemen-elemen komunikasi dakwah seperti ayat Al-Qur'an, retorika keagamaan, intonasi, gestur, dan simbol-simbol dakwah nyaris tidak muncul dalam tiga video yang dianalisis. Yang muncul justru adalah representasi pemerintah yang merespons Habib Rizieq, bukan representasi

komunikasi dakwah Habib Rizieq itu sendiri. Temuan ini menunjukkan bahwa media lebih memilih untuk membingkai peristiwa sebagai konflik politik daripada sebagai peristiwa dakwah. Akibatnya, komunikasi dakwah Habib Rizieq - yang merupakan inti dari pengaruhnya terhadap massa - menjadi terpinggirkan dan tidak teranalisis secara memadai. Hal ini menjadi keterbatasan sekaligus temuan kritis penelitian ini: bahwa dalam pemberitaan media, komunikasi dakwah Habib Rizieq direpresentasikan secara tidak langsung melalui respons pemerintah, bukan melalui analisis langsung terhadap pesan-pesan dakwahnya.

Dengan demikian, penelitian ini sebenarnya mengungkap bahwa "komunikasi dakwah Habib Rizieq" dalam pemberitaan media lebih merupakan konstruksi naratif dari pihak ketiga (media dan pemerintah) daripada representasi otentik dari praktik dakwah itu sendiri. Ini adalah temuan penting yang menunjukkan bagaimana media dan negara secara bersama-sama membentuk narasi tentang tokoh agama yang kontroversial.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberitaan media tentang komunikasi

dakwah Habib Rizieq Shihab dalam konteks sikap politik pemerintah membangun tiga mitos utama. Pertama, mitos pemerintah sebagai pelindung dan penegak hukum yang tegas, adil, dan berwibawa. Kedua, mitos Habib Rizieq sebagai ancaman stabilitas yang membawa kekacauan dan mengancam ketertiban publik. Ketiga, mitos konflik agama-politik sebagai pertarungan antara kepatuhan hukum dan perlawanan ideologis yang mengancam kebhinekaan.

Kontribusi teoritis penelitian ini adalah memperluas aplikasi semiotika Roland Barthes dalam analisis komunikasi dakwah di media, serta menawarkan pemahaman kritis tentang bagaimana media membentuk narasi konflik agama-politik melalui konstruksi mitos. Kontribusi praktis penelitian ini adalah memberikan kesadaran kritis bagi publik dan pembuat kebijakan tentang peran media dalam mengkonstruksi realitas sosial, serta pentingnya literasi media dalam memahami pemberitaan tentang isu-isu sensitif.

Keterbatasan penelitian ini meliputi: (1) data terbatas pada tiga video dari dua media nasional, sehingga belum mencakup representasi dari berbagai perspektif media; (2) analisis terbatas pada teks media tanpa melakukan wawancara dengan pemirsa untuk

memahami resepsi mereka; dan (3) komunikasi dakwah Habib Rizieq tidak terrepresentasi secara langsung dalam data, sehingga analisis lebih banyak pada representasi pemerintah dan media.

Agenda penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk: (1) membandingkan representasi komunikasi dakwah Habib Rizieq pada berbagai platform media digital (YouTube, media sosial, televisi, dan media cetak); (2) melakukan analisis resepsi untuk memahami bagaimana publik menafsirkan pemberitaan tentang tokoh agama yang kontroversial; dan (3) menganalisis secara langsung konten dakwah Habib Rizieq (ceramah, pidato) untuk mengungkap strategi komunikasi dakwahnya, bukan hanya representasi media.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Allen, G. (2003). *Roland Barthes*. Routledge.
- Barthes, R. (2006). *Mitologi / Penulis : Roland Barthes ; penerjemah : Nurhadi, A. Sihabut Millah (Ed. Revisi)*. Kreasi Wacana.
- Barthes, R. (2007). *Membedah mitos-mitos budaya massa : semiotika atau sosiologi tanda, simbol dan representasi / karya Roland Barthes ; penerjemah, Ikramullah Mahyuddin, Annete Laver; editor, Yosol Iriantara, Dede Lilis CH, Subandy (I. (penerjemah) Mahyuddin, A. (penerjemah) Laver, Subandy, Dede Lilis Ch, & Yosa Iriantara (eds.))*.

- Jalasutra.
- Culler, J. (1983). *Barthes: A Very Short Introduction*. Oxford University Press. .
- Fathimatuzzahra, R. ., & Hilmy, M. (2020). Religious Populism and the Emerging Political Religion in Indonesia: A Study on the Discourse of Habib Rizieq Shihab and the Islam Defenders Front (FPI). *Journal of Indonesian Islam*, 14(2), 269–294.
- Jahroni, J. (2018). Defending the Defenders? Aus-Indonesian Counter-Terrorism Cooperation and the Case of the Islamist Defenders Front. . *Gegründet*.
- KompasTV. (2020a). FPI Tak Terima Penolakan Kedatangan Rizieq Shihab, Deklarasi Damai Berujung Ricuh! *KompasTV on Youtube*. <https://www.youtube.com/watch?v=zkvFXhVmBiE>
- KompasTV. (2020b). Mahfud MD: Kami Sesalkan Sikap Habib Rizieq Shihab. *KompasTV on Youtube*.
- KompasTV. (2020c). Moeldoko: Apa yang Mau Direkonsiliasi dengan Habib Rizieq Shihab? *KompasTV on Youtube*.
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian Innovations: Crafting, Legitimizing, and Contesting New Modes of Governance. *Contemporary Southeast Asia*, 42(1), 31–56.
- Primasari, I. F. N. D., & Supena, A. (2021). Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Disleksia Dengan Metode Multisensori Di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 1799–1808. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1055>
- Salim, A. (2008). *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. . University of Hawaii Press.
- Sobur, A. (2009). *Semiotika komunikasi / Alex Sobur* (Cet. 4.). Remaja Rosdakarya.
- Van Leeuwen, T. (2005). *Introducing Social Semiotics*. Routledge.
- Woodward, M. ., Howell, C. ., Salim, H. ., & Yahya, M. (2014). Religious Patterns of Violence: The Case of FPI. In *Wielders of Violence . University of Washington Press*.
- Yuningrum, A. H. (2018). Mitos Politik dalam Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI): Analisis Semiotika Roland Barthes. . *Jurnal Studi Komunikasi*, 2(1), 129–142. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jsk/article/view/6257>